

PERTEMUAN IX DAN X AKUNTANSI PAJAK UNTUK ASSET TETAP DAN ASET LAINNYA

DESKRIPSI MATERI IX dan X:

Materi ini memberikan pengetahuan terkait aplikasi Akuntansi Pajak untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya. Penilaian akhir keberhasilan belajar mahasiswa pada materi ini menggunakan acuan patokan (PAP) dengan unsur penilaian meliputi unsur kehadiran, dan tugas-tugas.

Pertemuan	:	9 dan 10	
Kemampuan Akhir yang Diharapkan	:	Menguasai, menjabarkan, menganalisa dan mengaplikasikan Akuntansi Pajak untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya.	
Bahan Kajian, Materi Ajar	:	 Aset Tetap Perolehan Aset Tetap Penyusutan Aset Tetap Aset dengan Sewa Revaluasi Aktiva Tetap Penjualan Aset Aset Lainnya Amortisasi 	
Metode Pembelajaran	:	Pembelajaran kooperatif, Ekspositori, Inkuiri, dan Diskusi kelompok, ceramah dan tanya jawab	
Kriteria Indikator Penilaian	:	Mahasiswa mampu secara mandiri memahami, menjelaskan, menguasai, menjabarkan, menganalisa dan mengaplikasikan	

MATERI

1. ASSET TETAP

PSAK 16

Asset tetap adalah asset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Kecuali tanah.

1.1 PEMBELIAN ASSET TETAP

1) Pembelian dalam negeri

Contoh:

1 Januari 2008 PT.Xaxa membeli asset tetap Rp.200.000.000 belum termasuk PPN.

PT.Xaxa PKP

1 Jan Aset Tetap 200.000.000
PPN Masukan 20.000.000

Kas 220.000.000

PT. Xaxa bukan PKP

1 Jan Aset Tetap 220.000.000

Kas 220.000.000

PPN Masukan menjadi penambah harga perolehan

2) Pembelian impor

Contoh:

1 Januari 2009 PT. Xaxa mengimpor mesin dari Jerman dengan Nilai impor Rp.1.500.000.000

PT.Xaxa PKP memiliki API

1 Jan Aset Tetap 1.500.000.000

PPN Masukan 150.000.000

PPh 22 dibayar dimuka 37.500.000

Kas 1.687.500.000

PT. Xaxa bukan PKP memiliki API

1 Jan Aset Tetap 1.650.000.000
PPh 22 dibayar 37.500.000
dimuka

Kas 1.687.500.000

1.2 PENYUSUTAN ASET TETAP

Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta tersebut melalui penyusutan.

Metode penyusutan aktiva tetap yang diperbolehkan dalam ketentuan fiscal: Metode garis lurus dan metode saldo menurun.

Kelompok Harta	Masa Manfaat	Tarif penyusutan	
Berwujud		<u>Garis Lurus</u>	Saldo Menurun
I. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

CONTOH:

Gedung pabrik dibeli 1 Januari 2008 dengan harga perolehan Rp.600.000.000. Masa manfaat komersial selama 30 tahun. Menurut fiscal 20 tahun.

1 Jan Beban penyusutan gedung 20.000.000

Akumulasi penyusutan gedung 20.000.000

Komersial : Rp. 600.000.000/30 tahun = Rp. 20.000.000

Fiskal : Rp. $600.000.000 \times 5\% = Rp.30.000.000$

Atas perbedaan tersebut tidak perlu membuat jurnal penyesuaian. Perbedaan tersebut menimbulkan beda waktu saja. Pada saat mengisi SPT Tahunan diperlukan koreksi fiscal saja. (Rp.10.000.000)

1.3 PENJUALAN ASSET

Contoh:

Mobil operasional perusahaan yang diperoleh tanggal 12 Juli 2005 dengan harga Rp.48.000.000 dijual dengan harga Rp.40.000.000. Menurut akuntansi masa manfaat mobil 4 tahun, menurut pajak 8 tahun.

Keterangan	Akuntansi	Pajak
Harga perolehan	48.000.000	48.000.000
Akum. Penyusutan	(12.000.000)	(9.000.000)
Nilai Buku	36.000.000	39.000.000
Harga pasar	40.000.000	40.000.000
Laba Penjualan	4.000.000	1.000.000

Jurnal penjualan

31 Kas 44.000.000

Des

Akum Penyusutan kendaraan 12.000.000

Kendaraan48.000.000PPN Keluaran (Psl 16D)4.000.000Laba penjualan kendaraan4.000.000

Perbedaan pengakuan besarnya laba penjualan asset yang terjadi antara akuntansi dan pajak, perusahaan tidak perlu membuat jurnal penyesuaian. Perbedaan tersebut dikoreksi pada saat mengisi SPT tahunan sebesar Rp.4.000.000 – Rp.1.000.000 = Rp.3.000.000

Jurnal penyetoran PPN atas penyerahan asset oleh PKP ynag menurut tujuan semula asset tersebut tidak untuk diperjualbelikan terutang PPN, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

LATIHAN

PT. AJI adalah PKP yang memiliki API. Pada tanggal 17 Maret 2005 mengimpor mesin dengan FOB US\$1,000. Asuransi dan transport masing-masing 2% dan 4% dari FOB. Tarif BM dan BMT 20% dan 10% dari CIF. PPN 10%. Kurs Men Keu US\$1=Rp.10.000. Menurut akuntansi mesin tersebut masa manfaatnya 5 tahun, menurut pajak masuk ke kelompok 1. Metode penyusutan garis lurus. Tanggal 31 Desember 2006 mesin tersebut dijual dengan harga Rp.100.000.000

Ditanya:

- 1. Pencatatan perolehan aktiva tetap
- 2. Penyusutan aktiva tetap tahun 2005, dan besarnya koreksi fiscal dlam laporan SPT Tahun 2005
- 3. Perhitungan Laba rugi penjualan asset
- 4. Pencatatan penjualan aktiva tetap
- 5. Koreksi fiscal tahun 2006

Jawab:

1. NI = Rp.137.800.000

17 maret	Mesin	137.800.000	
2005	PPN Masukan	13.780.000	
	PPh 22 dibayar dimuka (2,5%xNI)	3.445.000	
	Kas		155.025.000

2. Beban penyusutan komersial:

Rp.137.800.000 / 5 tahun x 9/12 = Rp.20.670.000Beban penyusutan fiscal:

Rp.137.800.000 x 25% x 10/12 = Rp.28.708.333Koreksi negative pada rekonsiliasi fiscal =

Rp.28.708.333 - Rp.20.670.000 = Rp.8.038.333

3. Laba rugi penjualan mesin

Keterangan	Akuntansi	Pajak
Harga perolehan	137.800.000	137.800.000
Akum. Penyusutan	(48.230.000)	(63.158.333)
Nilai Buku	89.570.000	74.641.667
Harga pasar	100.000.000	100.000.000
Laba Penjualan	10.430.000	25.358.333

Akum peny Akuntansi : Rp.137.800.000 / 5 tahun x 1 9/12 = Rp. 48.230.000 Akum Peny fiscal : Rp.137.800.000 x 25% x 1 10/12 = Rp. 63.158.333

4. Jurnal penjualan aktiva tetap

31 Des 2006 Kas 110.000.000

Akum Penyusutan kendaraan 48.230.000

 Mesin
 137.800.000

 PPN Keluaran (Psl 16D)
 10.000.000

 Laba penjualan Mesin
 10.300.000

15 Jan 2007 PPN pasal 16 D 10.000.000

Kas 10.000.000

5. Koreksi positif: Rp. 25.358.333 – Rp.10.430.000 = Rp.14.928.333

2. SEWA ASSET TETAP

Jenis-jenis sewa menurut PSAK 30

1. Finance lease

Lessor: Pihak yang membiayai penyediaan barang modal.

Lessee : - memilih barang modal yang dibutuhkan atas nama perusahaan sewa

- Pemilik barang modal tsb

- melakukan pemesanan, pemeriksaan serta memelihara barang modal yang dijadikan obyek transaksi sewa.
- Selama masa sewa melakukan pembayaran secara berkala. Jumlah mencakup biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut berikut bunganya.

2. Operating lease

Lessor: membeli barang modal kemudian disewakan kepada lesse.

Lessee: membayar sewa membayar biaya sewa.

3. Sales Type lease

Sewa penjualan merupakan transaksi pembiayaan sewa secara langsung dimana jumlah transaksi termasuk laba yang diperhitungkan oleh pabrikan yang juga merupakan perusahaan sewa.

4. Leverage lease

Melibatkan:

- penyewa guna usaha,
- perusahaan sewa, dan
- kreditur jangka panjang yang membiayai transaksi sewa.

Jenis sewa yang diakui perpajakan:

1. sewa dengan hak opsi (finance lease)

karakteristik yang harus dipenuhi semua:

- pembayaran sewa masa sewa pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor.
- Masa sewa ditetapkan sekurang-kurangnya dua tahun untuk barang modal golongan I, tiga tahun untuk barang modal golongan II dan III, dan tujuh tahun untuk golongan bangunan.
- Perjanjian sewa memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee.

2. sewa tanpa hak opsi

adalah kegiatan jasa pembiayaan berupa penyediaan kredit bagi lesse oleh lessor.

Penghasilan lessor adalah bunga yang diterima pada saat angsuran pelunasan kewajiban sewa.

Perpajakan melarang penyusutan barang sewa ini, karena dianggap sebelum selesainya masa leasing asset bukan milik lessee maupun lessor.

Karakteristik:

- pembayaran sewa selama masa sewa pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal dan tidak menghasilkan keuntungan.
- Perjanjian sewa tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee.

2.1 PERLAKUAN PERPAJAKAN SEWA DENGAN HAK OPSI

BAGI LESSOR:

- a) Penghasilan kena pajak : pembayaran sewa dikurangai angsuran pokok.
- b) Tidak berhak melakukan penyusutan asset yang disewakan dengan hak opsi.
- c) Jika masa sewa lebih pendek dari yang telah ditentukan sebelumnya, DJP melakukan koreksi atas penghasilan lessor.
- d) Kerugian karena piutang tdk dp ditagih dibebankan pada cadangan piutang tak tertagih.
- e) Cadangan piutang lebih besar dari kenyataan, diakui sebagai penghasilan Cadangan piutang lebih kecil dari kenyataan, diakui sebagai kerugian.
- f) Penyerahan barang kepada lesse dikenakan PPN, penyerahan jasa dalam transaksi ke lesse tidak dikenakan PPN.
- g) Angsuran PPH pasal 25 setiap bulan adalah PPh terutang berdasarkan LK triwulan terakhir yang disetahunkan dibagi 12.

BAGI LESSEE:

- a) Selama masa sewa, lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewakan sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli.
- b) Dasar penyusutan adalah nilai sisa
- c) Pembayaran sewa dapat mengurangi penghasilan bruto lessee (jika memenuhi ketetentuan capital lease)
- d) Masa sewa lebih pendek dari masa yang ditetntukan, DJP melakukan koreksi atas pembebanan biaya sewa.

e) Lessee tidak memotong PPh 23 atas pembayaran sewa yang dibayar.

2.2 PERLAKUAN PERPAJAKAN SEWA TANPA HAK OPSI

BAGI LESSOR:

- a) Penghasilan kena pajak : seluruh pembayaran sewa yang diterima.
- b) Membebankan biaya penyusutan atas barang modal yang disewakan

BAGI LESSEE:

- a) Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto: pembayaran sewa yang dibayar.
- a. Memotong PPh 23 atas pembayaran sewa tsb
- b. Atas penyerahan jasa dalam transaksi sewa tanpa hak opsi dari lessor kepada lessee dikenai utang PPN.

CONTOH:

PT. A membeli mesin produksi dengan cara sewa (leasing) pada tanggal 1 Januari 2009, dimana pembelian ini merupakan capital lease. Setiap tahun PT.A harus membayar Rp.1.500.000 selama 4 tahun dan masa manfaat mesin 6 tahun. Pada akhir masa leasing, terdapat opsi pembelian dengan harga Rp.2.000.000 dan tingkat bunga implicit 10%. Selain membayar cicilan, PT.A juga harus membayar biaya leasing Rp.200.000 setiap tahunnya. Pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 1 januari 2009.

BAGI LESSEE:

Present value leasing = PV cicilan + PV nilai opsi

= (cicilan x 1-
$$_1$$
 + 1) + (Nilai opsi X $_1$)
$$(1+i)n-1$$

$$(1+i)n$$

$$i$$
= (1.500.000 x 1 - $_1$ + 1) + (2.000.000 X $_1$)
$$(1+0.1)3$$

$$(1+0.1)4$$

$$0,1$$
= (1.500.000 x 3.4869) + (2.000.000 x 0.6830)
= 6.596.350

1.700.000.

1 Jan	Mesin (leasing)	6.596.350	
	Utang leasing jk pendek		1.649.087,5
	Utang leasing jk panjang		4.947.262,5
	Utang leasing	1.500.000	
	Biaya bunga leasing	200.000	

Utang leasing jangka pendek (utang tahun 1) Rp.6.596.350/4 = 1.649.087,5

BAGI LESSOR:

Penghasilan ini dikenakan PPh badan tarif 28%

Kas

Dalam perpajakan asset tidak disusutkan, sampai dengan asset menjadi milik lessee. Di akuntansi disusutkan.

3. REVALUASI AKTIVA TETAP

Revaluasi asset tetap adalah suatu penilaian kemabali atas asset tetap yang dimiliki perusahaan sehingga dapat sesuai dengan harga pasar saat dilakukannya revaluasi tersebut.

Menurut perpajakan, revaluasi aktiva tetap merupakan penyesuaian cost asset tetap dengan harga pasar. Revaluasi asset menguntungkan karena pemerintah dapat melakukan pemajakan atas selisih dari cost asset tetap dengan harga pasar.

Penilaian kembali aktiva tetap harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap tsb yang berlaku pada saat penilaian kembali yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai yang mendapat izin pemerintah.

CONTOH 1

- 31 Desember 2009 PT.Betul benar berencana melakukan revaluasi aktiva tetap yang dimiliki:
 - 1. Tanah yang diperoleh Desember 2004 dengan harga perolehan Rp.500.000.000 dan harga revaluasi Rp.1.000.000.000
 - 2. Bangunan permanen diperoleh Januari 2007 dengan harga perolehan Rp.600.000.000 dan harga revaluasi Rp.850.000.000

3. Mesin termasuk kelompok 2 diperoleh Juli 2007 dengan harga perolehan Rp.100.000.000 dan harga revaluasi Rp.200.000.000

Metode penyusutan asset tetap menggunakan metode garis lurus.

JAWAB

Harga perolehan tanah: Rp. 500.000.000

Harga perolehan bangunan: Rp.600.000.000

Akum peny: 600.000.000/20 th x 3 (Rp.90.000.000)

Rp. 510.000.000

Harga perolehan mesin: Rp.100.000.000

Akum peny: 100.000.000 x 30/12 x8 (Rp.31.250.000)

Rp. 68.750.000

Nilai Buku Rp.1.138.750.000

Harga pasar (1.000.000.000+850.000.0000+200.000.000) = 2.050.000.000

Nilai buku = 1.138.750.000

Selisih lebih penilaian kembali = 911.250.000

PPh Final = $10\% \times (911.250.000 - 40.000.000)$

 $= 10\% \times 871.250.000$

= 87.100.000

Jurnal:

Tanah 500.000.000

Bangunan (850.000.000-600.000.000)+90.000.000 340.000.000

Mesin (200.000.000-100.000.000)+31.250.000 131.250.000

Selisih penilaian kembali asset tetap 971.250.000

PPh final atas revaluasi aktiva tetap 87.100.000

Kas/Bank 87.100.000

4. ASET LAIN-LAIN

PSAK 15

Aset tidak berwujud adalah asset nonmoneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administrative.

Penggolongan asset tidak berwujud berdasarkan masa manfaatnya:

- 1. Asset tidak berwujud dengan masa manfaat yang dibatasi oleh UU, peraturan atau sifat asset itu sendiri: Hak paten, hak cipta, dan franchise.
- 2. Aset tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak terbatas seperti merk dan goodwill.

Harta tidak berwujud dikelompokkan menjadi kelompok 1, 2, 3 dan 4 dengan masa manfaat 4,8,16 dan 20 tahun

4.1 PEROLEHAN ASET TIDAK BERWUJUD

4.1.1 GOODWILL

Adalah hak-hak istimewa yang dimiliki oleh suatu perusahaan.

Misal: keistimewaan lokasi, produksi, distribusi, nama, dan pengalaman yang lebih unggul dari perusahaan lain.

Perusahaan tidak dapat secara otomatis mencantumkan goodwill dalam neraca. Goodwill hanya dapat dicatat dalam pembukuan jika suatu perusahaan membeli perusahaan lain dengna harga diatas yang berlaku.

Niali goodwill yang dicantumkan adalah niali seluruh asset setelah dikurangi biaya. Untuk keperluan perpajakan, goodwill hanya dapat dicatat sebagai harta yang dapat diamortisasi apabila goodwill tersebut diperoleh melalui pembelian perusahaan.

4.1.2 BIAYA PENDIRIAN DAN PERLUASAN MODAL

Syarat suatu pengeluaran dikategorikan sebagai biaya organisasi adalah jika biaya tersebut dikeluarkan pada masa sebelum perusahaan beroperasi secara komersial dan bermanfaat selama beberapa tahun.

CONTOH

PT. B berdiri tahun 2005 talah menghabiskan biaya sebesar Rp.50.000.000 untuk mendapatkan izin pengurusan pendirian perushaan. Biaya ini diberlakukan sebagai asset lainnya dan memiliki masa manfaat 5 tahun, metode penyusutan garis lurus.

Jurnal menurut komersial:

Aset lainnya (tidak berwujud)	50.000.000	
Kas		50.000.000
Beban amortisasi asset tidak berwujud	10.000.000	
Aset lainnya		10.000.000

Menurut fiscal

Beban amortisasi 25% X 50.000.000 = 12.500.000

Selisih 12.500.000 – 10.000.000 = 2.500.000 merupakan koreksi fiscal

4.1.3 BIAYA PRA OPERASI

Adalah pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial dan yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun.

Contoh: biaya studi kelayakan, biaya produksi percobaan yang bukan rutin.

Disajikan dalam neraca komersial maupun fiscal adalah sama, yaitu disajikan dengan nilai bersih setelah dikurangi amortisasi.

4.2 AMORTISASI

Kelompok Harta	Masa Manfaat	Tarif penyusutan	
Berwujud		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

Biaya pendirian dan perluasan modal dapat dibebankan sebagai biaya pada tahun pengeluaran atau diamortisasi berdasarkan metode garis lurus atau saldo menurun.

Hak penambangan migas dapat diamortisasi berdasarkan metode satuan produksi, sedangkan hak penambangan yang lain serta hak pengusahaan hutan, sumber dan hasil alam diamortisasi berdasarkan metode satuan produksi dengan batasan paling banyak 20% pertahun. Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuan masa manfaat dan tarif amortisasi dalam UU PPh.

CONTOH 1

PT. Hey 1 januari 2007 mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000.000 belum termasuk PPN dan PPh pasal 26 untuk memperoleh waralaba McD selama 4 tahun.

Perhitungan amortisasi menurut metode garis lurus:

Tahun 2007

Amortisasi: 25%x200.000.000=50.000.000

Nilai sisa buku: 150.000.000

Tahun 2008=50.000.000, Nilai Sisa Buku :100.000.000
Tahun 2009=50.000.000, Nilai Sisa Buku : 50.000.000

Tahun 2010=50.000.000, Nilai sisa Buku = 0

Jurnal:

1 Jan 2007	Waralaba	200.000.000	
	PPN Masukan	20.000.000	
	Utang PPh pasal 26		40.000.000
	Kas		180.000.000
10 Feb 2007	Utang PPh Pasal 26	40.000.000	
	Kas		40.000.000
31 Des 2007	Beban amortisasi	50.000.000	
	Waralaba		50.000.000
31 Des 2008	Beban amortisasi	50.000.000	
	Waralaba		50.000.000

31 Des 2009	Beban amortisasi	50.000.000	
	Waralaba		50.000.000
31 Des 2010	Beban amortisasi	50.000.000	
	Waralaba		50.000.000

CONTOH 2

PT. Hey 1 januari 2007 mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000.000 belum termasuk PPN dan PPh pasal 23 untuk memperoleh waralaba Es Teler 77 selama 4 tahun. Perhitungan amortisasi menurut metode garis lurus:

Tahun 2007 Amortisasi: 25%x200.000.000=50.000.000

Nilai sisa buku: 150.000.000

Tahun 2008 =50.000.000, Nilai sisa buku: 100.000.000
Tahun 2009=50.000.000, Nilai sisa buku: 50.000.000

Tahun 2010 =50.000.000, Nilai sisa buku: 0

Jurnal:

1 Jan 2007	Waralaba	200.000.000	
	PPN Masukan	20.000.000	
	Utang PPh pasal 23		30.000.000
	Kas		190.000.000
10 Feb 2007	Utang PPh Pasal 26	30.000.000	
	Kas		30.000.000
31 Des 2007	Beban amortisasi	50.000.000	
	Waralaba		50.000.000
31 Des 2008	Beban amortisasi Waralaba	50.000.000	50.000.000
31 Des 2009	Beban amortisasi	50.000.000	

Waralaba 50.000.000

31 Des 2010 Beban amortisasi 50.000.000

Waralaba 50.000.000

Jurnal untuk Es Teler 77:

1 Jan 2007 Kas 190.000.000

PPh 23 dibayar dimuka 30.000.000

PPN Keluaran 20.000.000
Pendapatan waralab 200.000.000

LATIHAN DAN TUGAS

Bagaimana perlakuan Akuntansi Pajak atas transaksi tersebut dibawah ini:

- 1) Pada tanggal 1 Januari 2012 PT.YXY membeli mesin produksi dari PT. UIH di Bandung sebesar Rp.2.557.570.000 belum termasuk PPN.?
- 2) Pada tanggal 13 Februari 2014 PT. ASA tidak memiliki API, mengimpor mesin rajut dari Italia dengan Nilai impor sebesar Rp.3.575.000.000
- 3) Toko display PT.ROAR dibeli sudah jadi dari PT.LOL pada tanggap 3 Maret 2014 dengan harga perolehan sebesar Rp.3.670.000.000. Masa manfaat komersial selama 30 tahun.
- 4) Mobil armada PT.UIS yang diperoleh tanggal 12 Juli 2015 dengan harga Rp.148.700.000 dijual dengan harga Rp.170.000.000 kepada PT.YOW. Menurut akuntansi masa manfaat mobil 4 tahun.
- 5) PT. AJO membeli mesin produksi dengan cara sewa (leasing) pada tanggal 20 April 2015, dimana pembelian ini merupakan *capital lease*. Setiap tahun PT.AJO harus membayar Rp.4.570.000 selama 4 tahun dan masa manfaat mesin 6 tahun. Pada akhir masa leasing, terdapat opsi pembelian dengan harga Rp.25.000.000 dan tingkat bunga implicit 15%. Selain membayar cicilan, PT.A juga harus membayar biaya leasing Rp.1.277.000 setiap tahunnya. Pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 20 April 2016.
- 6) 31 Desember 2014 PT.HAYU berencana melakukan revaluasi aktiva tetap yang dimiliki:
 - a) Tanah yang diperoleh Desember 2014 dengan harga perolehan Rp.7.500.000.000 dan harga revaluasi Rp.16.000.000.000
 - Bangunan permanen diperoleh Januari 2015 dengan harga perolehan
 Rp.3.675.000.000 dan harga revaluasi Rp.5.850.000.000
 - c) Mesin termasuk kelompok 2 diperoleh Juli 2013 dengan harga perolehan Rp.1.000.000.000 dan harga revaluasi Rp.2.500.000.000

Metode penyusutan asset tetap menggunakan metode garis lurus.

7) PT. OIB berdiri tahun 2012 talah menghabiskan biaya sebesar Rp.350.000.000 untuk mendapatkan izin pengurusan pendirian perusahaan. Biaya ini diberlakukan sebagai asset lainnya dan memiliki masa manfaat 5 tahun, metode penyusutan garis lurus.

8) PT. OII pada tanggal 15 januari 2015 mengeluarkan uang sebesar Rp.2.600.000.000 belum termasuk PPN dan PPh pasal 26 untuk memperoleh waralaba produk makanan untuk masa selama 8 tahun. Perhitungan amortisasi menurut metode garis lurus:

DAFTAR PUSTAKA

Soekrisno Agus dan Estralita Tresnawati, Akuntansi Perpajakan, Salemba Empat, 2014, Jakarta